

DI SELURUH KABUPATEN

Apkasi Dorong Investasi Hijau

JAKARTA (KR) - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong perkembangan investasi hijau di seluruh kabupaten yang berpotensi untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya.

Sekjen Apkasi Adnan Purichta Ichsan saat mengisi diskusi di Jakarta, Rabu (20/7) mengatakan, pembahasan investasi hijau saat ini sudah merambah di tingkat global karena bermanfaat untuk menjaga kelangsungan lingkungan.

"Kami sangat mendukung diskusi seperti ini, karena membantu memperluas wawasan kami dan lebih terarah untuk melengkapi diri terhadap potensi investasi hijau yang masuk ke daerah. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

la pun mengharapkan adanya koordinasi antarpemangku kepentingan agar daya saing dan kapasitas daerah mampu mengakses peluang insentif pendanaan dan investasi hijau yang berguna untuk pengembangan daerah.

Sebelumnya, untuk menyongsong Perhelatan G20, Kementerian Investasi/BKPM telah menyusun Panduan Investasi Berkelanjutan (Sustainable Investment Guidance - SIG) berdasarkan standar Environment, Social, Governance (ESG).

ESG merupakan panduan bagi industri di Indonesia dalam menjalankan proses kegiatan usaha, sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saing merespons kebutuhan pasar.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan menyam-

paikan, terdapat 47 proyek investasi berkelanjutan senilai kurang lebih Rp 150 triliun yang telah dipetakan untuk memudahkan investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi di Indonesia.

"Panduan ESG untuk memastikan agar investasi yang masuk ke Indonesia dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan UMKM dengan melalui gerakan kolektif untuk mendorong pertumbuhan ekosistem investasi hijau skala besar dan UMKM di Indonesia," katanya.

Indra menambahkan setidaknya dalam lima tahun ke depan, terdapat setidaknya 100 bisnis berkelanjutan dalam berbagai skala yang terkait dengan yurisdiksi dengan hutan/gambut/ekosistem penting dengan investasi mencapai 200 juta dolar AS. (Ant/San)-d

ORANG TUA TENTUKAN KEBERHASILAN PROGRAM

Bantuan PIP Jangan Sampai Meleset



KR-Istimewa

Sosialisasi PIP oleh Anggota DPR RI Esti Wiyajati.

SLEMAN (KR) - Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak sekolah yang akan segera cair dalam waktu dekat perlu kesiapan berbagai pihak. Pihak orangtua dan sekolah sangat menentukan bantuan PIP bisa berjalan sesuai dengan peruntukannya guna menunjang kelancaran belajar anak-anak peserta didik.

"Dalam waktu dekat PIP akan cair. Penggunaannya jangan sampai meleset, digunakan tidak sebagaimana mestinya. Bantuan PIP bukan untuk nyumbang hajatan, bukan untuk beli rokok, tidak untuk beli bedak dan lipstik. orangtua wali murid dan pihak sekolah harus ikut menentukan program ini berjalan baik tepat penggunaannya untuk menunjang kegiatan pembel-

ajaran anak-anak peserta didik," kata anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan DIY, My Esti Wiyajati, Rabu (20/7).

Sosialisasi PIP dilakukan Esti dalam sepekan terakhir, diikuti perwakilan sekolah dan orangtua wali siswa penerima PIP. Esti mengatakan, sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, dirinya berkepentingan mengawal pelaksanaan PIP dapat berjalan baik dan betul-betul membantu masyarakat membiayai kebutuhan anak-anak sekolah. "Jadi peruntukan PIP ini harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," tandas Esti.

Esti menyarankan kepada pihak sekolah untuk bersedia mendampingi setiap anak dalam pencairan PIP ke bank-

bank yang telah ditunjuk pemerintah. Sekolah harus ikut berperan menyakinkan kepada siswa peserta didik dan orangtua wali murid, bantuan yang diterima untuk menunjang kelancaran kegiatan sekolah, seperti pembelian buku materi dan peralatan pendukung sekolah lainnya. Adapun khusus sekolah swasta yang diperbolehkan memberlakukan iuran SPP, bantuan PIP dapat diprioritaskan untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan pembayaran.

"Bantuan PIP hendaknya dapat menunjang prestasi pendidikan anak-anak kita," tandas anggota Komisi VIII DPR RI yang mendapat rekomendasi Ketua DPR RI Puan Maharani menyalurkan bantuan PIP DIY.

Bantuan akan dikirim langsung pemerintah ke rekening anak sangat disarankan ikut didampingi pihak orangtua. Untuk siswa jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Untuk siswa jenjang pendidikan SMA dan SMK ke Bank Negara Indonesia atau BNI. Adapun siswa jenjang pendidikan SD akan terima Rp 450.000, siswa SMP terima Rp 750.000 dan siswa SMA-SMK akan terima Rp 1 juta. (Jon)-f

Calonkan

mitra di Timor Leste membuka lembaga pendidikan," ujar Haedar Nashir.

Haedar mengatakan, sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan serta peran-peran dalam kemanusiaan, Muhammadiyah memiliki pandangan sama dengan Horta. "Kami satu pandangan dimana Presiden Ramos Horta juga menaruh perhatian pada persoalan-persoalan perdamaian dan kemanusiaan di tingkat global," tuturnya.

Presiden Timor Leste menyampaikan kebahagiaannya dapat mengeksplorasi kerja sama dengan Muhammadiyah. "Ini menjadi kehormatan bagi kami untuk me-

Sumbangan hal 1

ngunjungi Muhammadiyah, serta untuk mengeksplorasi kerja sama lebih lanjut, dan bagaimana Muhammadiyah, NU, Indonesia dan Timor Leste bisa bekerja lebih banyak bersama-sama," ujar Ramos Horta.

Haedar Nashir juga menyatakan dukungannya kepada Timor Leste untuk menjadi Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). "Kami Muhammadiyah mendukung Timor Leste menjadi anggota ASEAN," ujar Haedar Nashir.

Haedar Nashir menyampaikan terima kasih kepada Horta yang telah mengusul-

Sumbangan hal 1

kan Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai calon penerima Nobel Perdamaian. "Presiden Timor Leste Ramos Horta termasuk tokoh yang mendukung kami (Muhammadiyah) bersama NU untuk memperoleh Nobel Perdamaian," katanya.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengapresiasi rencana pencalonan oleh Presiden Timor Leste tersebut. Hal itu merupakan suatu kehormatan sekaligus momen yang luar biasa bagi NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia.

Sebelumnya, pada 2021, kata Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf, Presiden Ramos Horta telah mencalonkan NU untuk meraih nobel perdamaian. "Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa Presiden Ramos Horta telah mencalonkan NU untuk nobel perdamaian pada tahun lalu dan dia ingin mencalonkannya lagi. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami semua," ucapnya.

Presiden Ramos Horta juga mencalonkan PBNU untuk bergabung ke dalam Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) serta menjadi calon peraih Zayed Award for Human Fraternity.

Presiden Ramos Horta beserta rombongan disambut Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifulhul Yusuf. Dalam pertemuan tertutup, dibahas beberapa hal, seperti rencana kerja sama Timor Leste dengan PBNU untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemanusiaan. PBNU juga mengundang Timor Leste untuk menghadiri pertemuan Religion of Twenty (G20) di Bali, 2-3 November. (Ant/San)-d

CCTV

Menurut Kapolrestabes, dilihat dari adegan ke adegan, apalagi terlihat saat korban ke luar rumah dan dalam waktu bersamaan ada pelaku yang sibuk menelepon seolah memberi informasi kepada rekannya tentang orang yang dijadikan sasaran. Dengan adanya kenyataan itu, kuat dugaan aksi penembakan itu ada yang mengendalikannya.

Dandim 0733 Semarang Letkol Infanteri Honi Havana yang juga menyaksikan bedah dan analisa CCTV

Sumbangan hal 1

mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam tim pengusutan sudah berhasil mengidentifikasi pelaku.

la menyebutkan, analisa CCTV bertujuan sebagai upaya kita menjelaskan ke masyarakat, sekaligus kesempatan pelaku untuk menyerahkan diri. "Kami berharap pelaku segera menyerahkan diri, karena tim gabungan Polri dan TNI sudah berhasil mengidentifikasi para pelaku," ujar Dandim 0733 Letkol Inf Honi Havana. (Cry)-d

Wujudkan

Bupati Bantul menyerukan Nawala Bupati yang terdiri tujuh pesan, di antaranya agar meningkatkan pengamalan Pancasila guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan. Membangun semangat gotong-royong sebagai kekuatan utama pembangun-

Sumbangan hal 1

an. Upacara diakhiri pentas tari kolosal Gumregah Ambangun Bantul Projo-tamansari oleh putra-putri Kabupaten Bantul, penyerahan hadiah juara Lomba Bregada, dilanjutkan karnaval dari Lapangan Tlirenggo sampai Sim-pangan Lima Bejen. (Jdm/Roy)-f

Miskin

Beberapa tahun lalu penulis bersama tim tenaga ahli (dosen) pernah menyusun Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan. Perda diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja tim penanggulangan kemiskinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di Yogyakarta. Selama proses penyusunan Peraturan Daerah setidaknya ada 3 hal yang menjadi fokus pencerminan tim : data kemiskinan, program penanggulangan dan tim pelaksana penanggulangan.

Dalam hal pencerminan data kemiskinan tidak bisa dipungkiri masih sering ditemui masalah, salah satunya ketidakvalidan data dengan realitas di lapangan. Banyak pihak yang secara birokratif terlibat dalam proses penanggulangan kemiskinan mengonfirmasikan bahwa ada (banyak) data yang perlu dilakukan validasi ulang. Karena hal ini berkaitan langsung dengan siapa yang berhak untuk menerima bantuan dan siapa yang tidak.

Kemudian berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan, jika dicermati pada aspek kebijakan bisa jadi pemerintah daerah sudah mencoba melakukan observasi atau pencerminan secara akademik. Untuk memastikan solusi penanganannya yang cepat dan tepat.

Sumbangan hal 1

Akan tetapi persoalan yang tidak kalah penting adalah menyandingkan realisasi dari kebijakan tersebut dengan realitas. Apakah kebijakan yang dihasilkan sudah benar-benar tepat ataukah tidak cukup menimbulkan efek efektivitas penurunan kemiskinan secara progresif? Pertanyaan kritis selanjutnya, jika kebijakan yang diinisiasi sudah tepat akan tetapi hasilnya tidak sesuai harapan, apa yang menjadi penyebabnya?

John Friedman (1992) dalam bukunya *Empowerment, The Politics Of Alternative Development*, menjelaskan bahwa penyebab kemiskinan yang dialami seseorang atau komunitas sosial tertentu yakni persoalan ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial di sini meliputi modal produktif, penguasaan aset, organisasi sosial-politik sebagai sarana untuk mencapai kepentingan bersama, dan jaringan sosial untuk mengakses pekerjaan. Adapun pada perspektif lain, ada kebijakan yang menekankan pada aspek persamaan. Hanya akan cenderung bersifat meritokrasi. Penekanan ini hanya menghasilkan persaingan dalam persamaan bukan dalam hal pencapaian (Bagong Suyanto, 2018).

Sumbangan hal 1

Memahami kemiskinan memang harus dilakukan secara komprehensif dengan melihat semua perspektif. Karena bisa jadi kebijakan yang dinilai egaliter dalam realitasnya tidak mencerminkan hal yang sama. Bahkan perspektif atas etos kerja yang digunakan sebagai salah satu pisau analisis untuk melihat kemiskinan, yakni mereka yang berada dalam lingkaran kemiskinan dikarenakan tidak memiliki etos kerja bisa jadi salah. Bukan tidak mungkin kemiskinan yang terjadi lebih dikarenakan posisi tawar yang lemah, ketidakberdayaan dan ketiadaan pada akses hukum yang mampu melindungi kepentingan sosial-ekonomi publik.

Apapun alasannya, kemiskinan apalagi dalam kategori ekstrem merupakan kondisi sosial yang sangat memprihatinkan. Siapapun penduduk di negara ini berhak untuk hidup sejahtera. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Ubah konstruksi atas penanggulangan kemiskinan yang masih menggunakan logika yang tidak mendukung adanya keberdayaan, akses hukum yang adil, dan penguatan posisi tawar publik atas hak kesejahteraan yang pantas mereka terima. (Penulis, peneliti sosial politik dan Tenaga Ahli DPRD Kab Sleman)-d

Satpol PP

"Saat ini kami menunggu Peraturan Wali Kota (Perwal) pelarangan skuter dan otoped listrik di Kota Yogyakarta. Apabila perwal tersebut sudah keluar, Satpol PP bisa memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran termasuk melakukan pengaman atau penyitaan," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta, Rabu (20/7).

Menurut Noviar, meski rambu-rambu soal larangan pengoperasian skuter sudah dipasang di sejumlah titik. Tapi masih banyak pengelola skuter listrik yang nekat dan kucing-kucingan beroperasi. Biasanya mereka melakukan aktivitas saat petugas dari Satpol PP sudah tidak berada di lokasi (tidak ada pengawasan) yaitu di atas pukul 22.00 WIB.

Sumbangan hal 1

"Selama ini petugas mengawasi kawasan Malioboro pada pukul 17.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Kalau petugas sudah pulang, penyedia jasa skuter listrik mengeluarkan barang untuk disewakan. Karena sudah tidak ada petugas, saat malam saya cuma bisa melihat di CCTV. Setelah petugas pulang mereka akan mengeluarkan skuternya," jelas Noviar.

Kepala Satpol PP DIY mengaku, mengapresiasi Pejabat (Pj) Walikota yang mengeluarkan Perwal larangan skuter dan otoped listrik yang bisa menguatkan SE Gubernur sebelumnya. Karena larangan soal itu tidak hanya di Kota Yogyakarta, tapi sudah diberlakukan Bandung dan DKI Jakarta. (Ria)-f

Polri

pembunuhan berencana dengan nomor: LP/B/0386/VI/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 18 SKRIM 2022.

Dugaan tersebut berdasarkan dari kondisi tubuh Brigadir J yang mengalami luka selain luka tembak, juga terdapat luka sayatan, serta lebam dan memar di bagian perut sisi kiri dan kanan.

"Tujuan diundangnya adalah untuk melaksanakan gelar perkara awal tentang adanya laporan kami atas dugaan tindak pidana pembunuhan dengan berencana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 340 KUHP juncto Pasal 338 juncto Pasal 351 ayat 3 KUHP juncto Pasal 55 tentang penyerataan juncto Pasal 56 tentang perbantuan," kata Kamaruddin Simanjuntak.

Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Bharada E di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdj Sambo (sudah nonaktif) di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (8/7).

Kadiv Humas Polri memastikan pertemuan antara penyidik, kedokteran forensik, dan perwakilan keluarga Brigadir J dan pengacara terkait dengan penyampaian hasil autopsi berlangsung se-

Sumbangan hal 1

suai jadwal. "Ya, jadwalnya masih seperti itu," kata Dedi. Sebelumnya Dedi mengatakan, Polri akan menyampaikannya hasil autopsi awal kedokteran forensik kepada keluarga dan pengacara Brigadir J, sebagai wujud transparansi proses penyidikan kasus baku tembak di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdj Sambo.

Menurut Dedi, pihak keluarga dan juga pengacara akan mendapat gambaran terkait hasil autopsi awal yang sudah dilakukan oleh penyidik dan kedokteran forensik. Diharapkan dengan mendapat penjelasan tersebut, berbagai spekulasi terkait luka-luka selain luka tembak di tubuh Brigadir J menjadi terang dan terungkap. (Ant)-d



Prakiraan Cuaca Kamis, 21 Juli 2022

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-90
Sleman	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-30	65-90
Wates	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-90
Wonosari	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-30	65-90
Yogyakarta	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-90

Aditya Maulana Hasymi, SIP, MA
Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas AMIKOM Yogyakarta

JANGAN pernah meremehkan urusan perut. Secara kasat mata memang terlihat bahwa perihal makanan adalah pemenuhan konsumsi sehari-hari. Padahal, bermula dari jiwa yang segar dan kenyang, maka pada titik itulah segala urusan berjalan baik, termasuk urusan politik.

Langkah berani ditunjukkan Presiden Indonesia, Joko Widodo,

Ada Gandum di Antara Jokowi, Zelensky, dan Putin

dengan melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia saat wilayahnya sedang dalam tensi tinggi. Apa yang dilakukan Jokowi dilandasi upaya mediasi dengan bertemu langsung kedua kepala negara yang bersitegang, Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin.

Jokowi selama dua hari di akhir bulan Juni 2022 mencoba menjadi jembatan bagi ketegangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Niatan tersebut menjadi gayung bersambut ketika Zelensky dan Putin dengan tangan terbuka memberi tempat bagi Presiden RI ke 7 itu secara langsung.

Publik internasional mengapresiasi keberanian Jokowi dengan sukarela menjadi penengah di antara Ukraina dan Rusia yang begitu gencar saling mempertahankan wilayahnya. Sikap yang diambil sosok asal Solo ini merupakan repres-

sentasi politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak manapun atau bertahap sebagai negara non-blok. Selain itu, dari kacamata penegakan kebijakan luar negeri, apa yang dijawantahkan oleh tandem dari KH. Ma'ruf Amin ini sebagai kepala negara juga memperdagang ide bapak bangsa Moh Hatta: "Politik Luar Negeri Bebas Aktif". Apa yang dilakukan Jokowi ini dapat dinilai pula sebagai upaya memperkuat posisi Republik Indonesia saat memegang presidensi G-20, dimana Ukraina dan Rusia menjadi anggotanya.

Sisi yang nampak adalah Joko Widodo sebagai kepala negara Indonesia melakukan upaya hubungan internasional dengan Ukraina dan Rusia pada tataran politik tingkat tinggi (*high politics*). Fokus pada pertahanan demi kondisi damai menjadi wajah yang amat terlihat. Walakin, jika ditilik secara mendalam, ada urusan politik tingkat

rendah (*low politics*) yang kentara di sana.

Ya, satu yang terlihat dari sambutan Joko Widodo menuju Ukraina dan Rusia adalah upaya melakukan diplomasi pangan. Keamanan pasokan pangan domestik menjadi titik penting yang diamankan.

Ketersediaan bahan pokok makanan sendiri, dalam politik internasional, dikategorikan sebagai kepentingan politik level bawah atau kerap disebut sebagai *low politics*. Pangan sebagai kebutuhan primer sebuah negara bisa bersalin rupa dari kepentingan domestik menjadi kepentingan global, ketika ketidakcukupan terjadi, hingga berbuah konflik yang mengancam keamanan manusia.

Pada studi hubungan internasional, upaya kelabanan pangan kemudian berada politis ketika ditinjau dari konsep sekuritisasi

(*the securitization of food*). Benjamin Shepherd dalam artikel ilmiahnya berjudul "*Thinking Critically about Food Security*" (2012) menunjukkan bahwa pasca era Perang Dingin, pengertian dari keamanan telah melebar dari mulanya bersifat tradisional menjadi non-tradisional. Fenomena tersebut dilihat dari ancaman fisik yang berasal dari eksternal dalam kategori tradisional menuju kepada yang bersifat non-tradisional ketika lingkungan internal juga turut memberikan ancaman. Dus, pangan yang terus menerus diproduksi secara domestik, menurut Shepherd, akan menjadi bahaya yang mengancam negara ketika ketersediaan tak tercukupi.

Pada era globalisasi seperti saat ini, ketersediaan bahan pangan merupakan indikator bagi politik internasional mampu berlangsung kondusif. Kajian dari Paul Teng dan

Jonatan Lassa dalam bab buku "An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach" (2016) menunjukkan bahwa negara kini harus mampu memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi bagi masyarakatnya. Ketika hal itu terjadi, menurut Teng & Lassa, merupakan penentu utama bagi legitimasi keberadaan negara dalam lanskap politik global.

Menilik pada relasi yang terjadi antara Joko Widodo, Volodymyr Zelensky, dan Vladimir Putin sebagai kepala negara dapat dihubungkan pada satu komoditas pangan yakni gandum.

Indonesia dikenal sebagai negara yang menyandarkan maknanya pokoknya selain beras kepada gandum. Ketergantungan akan konsumsi dari hasil pertanian ini dapat dilihat dari data Food and Agriculture Organization (FAO) pada 2020



dimana Indonesia menyentuh angka 10 juta ton mengimpor pasokan gandum. Pada siapa mitra utama pasokan tersebut? Ya, bersumber utama dari Ukraina. Kondisi menjadi rumit ketika Ukraina dalam posisi tidak kondusif. Ketegangan yang terjadi dengan Rusia membuat produksi dan distribusi gandum tak lagi lancar. Ada pintu distribusi gandum yang tertutup dimana Rusia menjadi penguasa wilayahnya.

Pada era yang menekankan konektivitas seperti saat ini membuat kondisi damai dalam lingkup politik global menjadi penting untuk dijaga. Apabila terhambat barang sedikit saja, keamanan manusia akan terancam, seperti halnya pasokan pangan. Apa yang terjadi dalam relasi antara Indonesia, Ukraina, dan Rusia menunjukkan hal tersebut.***